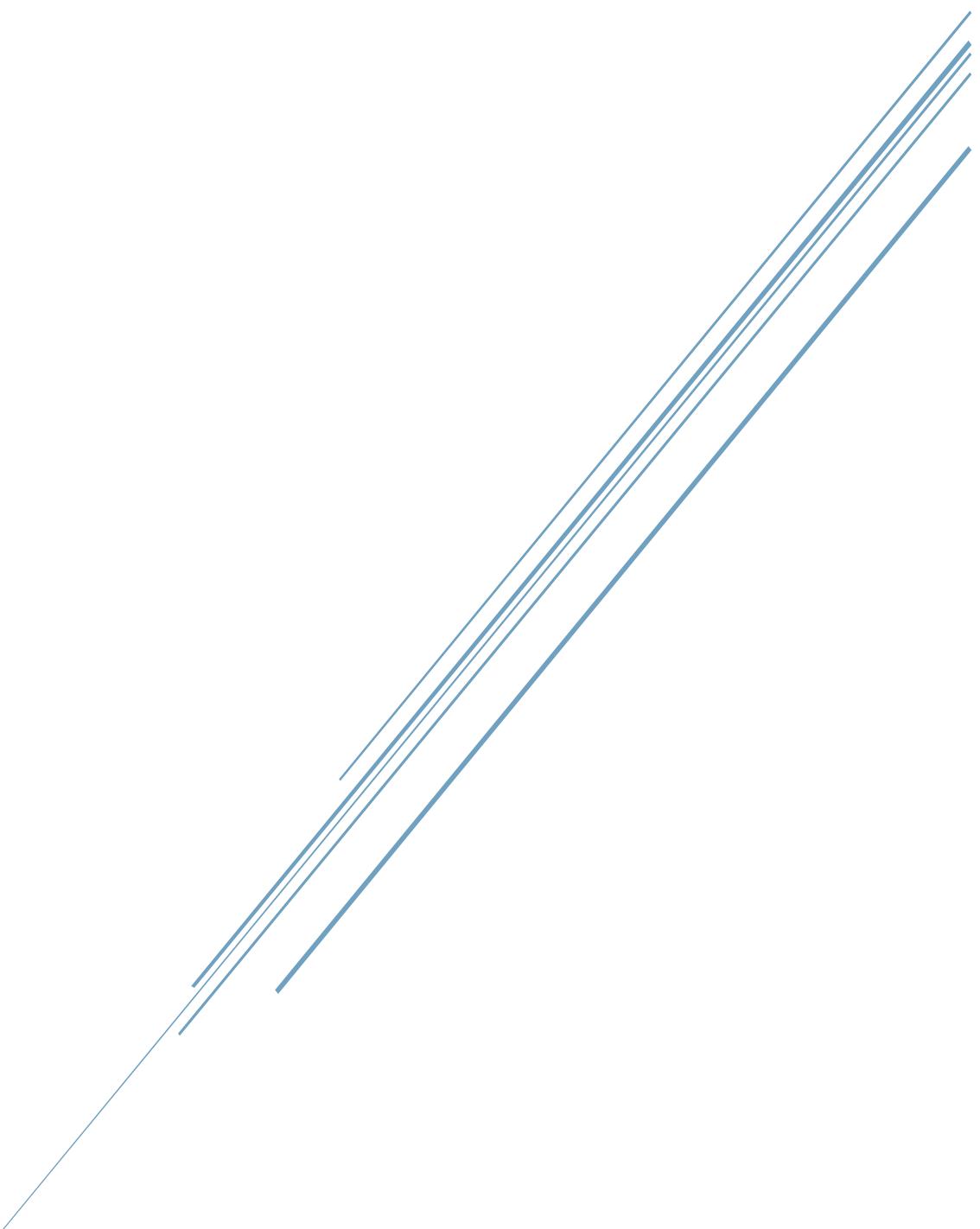


LAPORAN KINERJA

KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Susua Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. LAKIP ini berisi paparan perencanaan dan pencapaian kinerja Kecamatan Susua termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, keberhasilan, kegagalan dan dampak dari kinerja Kecamatan kepada masyarakat.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Sifalago Susua, Januari 2025
Camat Susua,


GOODLIBER BU'ULOLO, SST
Penata Tk. I
NIP. 19781107 200701 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang menjadi bagian dari sebuah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Selain dari fungsi tadi kecamatan juga berperan penting fungsi koordinasi yang antara lain dalam pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Kecamatan Susua Tahun 2024, dari 4 (empat) indicator kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, dalam pencapaian tersebut masih banyak kekurangan dan kelemahan Kantor Camat Susua yang akan diperbaiki dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Susua selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik atas kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Berkenan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diandalkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Susua

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Kecamatan Susua Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan Susua dan dapat dilihat dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Susua periode 2021-2026.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, kecamatan menjadi instansi pemerintah yang sangat berperan penting dalam memastikan terselenggarannya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belym dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawaian serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa da/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimaldi wilayahnya;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang- undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. Kasi Kesejahteraan Sosial

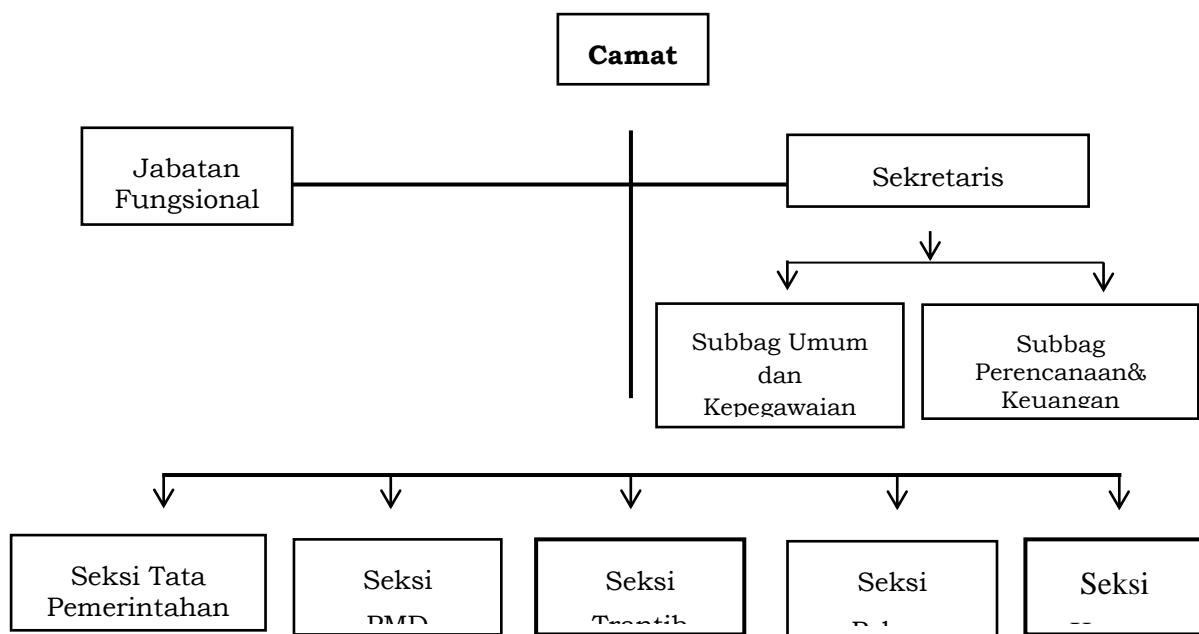
Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR CAMAT SUSUA



D. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan di Kecamatan dan melayani masyarakat di Kecamatan Susua, Kantor Camat Susua didukung oleh 12 Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Tenaga harian lepas yang akan dirinci sebagai berikut :

a. Data Jumlah Pegawai terdiri atas :

No	Kriteria Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	
3	Tenaga Harian Lepas	6 orang	

	Jumlah	20 orang	
--	--------	----------	--

b. Jumlah Pegawai berdasarkan eselon terdiri dari :

No	Eselonisasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Eselon III.a	1 orang	
2	Eselon III.b	1 orang	
3	Eselon IV.a	4 orang	
4	Eselon IV.b	1 orang	
5	Staf	2 orang	
6	Kepala Desa	3 orang	
7	Sekretaris Desa	2 orang	
	Jumlah	14 orang	

c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan terdiri dari :

No	Golongan PNS	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV/a	-	
2	Golongan III/d	4 orang	
3	Golongan III/c	2 orang	
4	Golongan III/b	2 orang	
5	Golongan III/a	1 orang	
6	Golongan II.d	2 orang	
7	Golongan II.c	3 orang	
	Jumlah	14 orang	

d. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari :

No	Pendidikan PNS	Jumlah	Keterangan
1	Strata Dua (S-2)	1 Orang	
2	Strata Satu (S-1)	7 orang	
3	Diploma -3	-	
4	SMA	6 orang	
	Jumlah	14 orang	

e. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari :

f.

No	Jenis Kelamin PNS	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	13 orang	
2	Perempuan	1 orang	
	Jumlah	14 orang	

Tabel 2.1.Data Inventaris Barang Kantor Camat Susua

No	Nama Barang	Bahan	Tahun Perolehan	Jumlah	Keadaan Barang		
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Pertapakan Bangunan Kantor Camat Susua	-		200 m x 500	-	✓	-
2	Mesin Genset	besi	2015	1	-	-	Hilang
3	Kipas Angin	plastik	2015	1	-	-	✓
4	Fail Kabinet	-	2015	1	✓	-	-
5	Komputer PC LG	Besi dan plastik	2015	2	-	✓	-
6	Printer L130 Canon	Besi dan plastik	2015	2	-	-	✓
7	Pertapakan Bangunan Kantor	-		20x25	-	✓	-
8	Lemari Topik	-	2005	4	-	✓	-
9	Meja ½ Biro	kayu	2013	6	-	✓	-
10	Kursi Putar	Plastik +Gabus	2013	1	✓	-	-
11	Kursi Plastik	Plastik	2013	5 lusin	-	✓	-

12	Soud system	Besi dan plastik	2015	1 unit	-	✓	-
----	-------------	------------------	------	--------	---	---	---

E. Isu Strategis

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2016-2021 yang lalu, Pencapaian kinerja Kantor Camat Susua adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan/ Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
3. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya;
4. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
6. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih sangat kurang;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
8. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah;
9. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
10. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan masih rendah;
11. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal;
12. Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka sendiri;

13. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan terutama pada masyarakat Desa.
14. Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan dan perdesaan banyak mengalami hambatan dikarenakan sumber yang ada berada jauh dari lokasi permukiman sehingga lebih banyak menggunakan sistem sumur gali (masih tradisional) ataupun memakai air sungai dan air hujan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Anggaran dan Capaian Kinerja Pelayanan selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Susua adalah :

1. Anggaran Keuangan daerah mengalami defisit sehingga berdampak pada pemotongan anggaran Kecamatan;
2. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan capaian kinerja.

Pada periode RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dikaji dan dianalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan di kecamatan Susua. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan
2. Penambahan personil aparatur kecamatan berdasarkan analisis jabatan (ANJAB)
3. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SOP
4. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi kecamatan dan desa melalui pembinaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
6. Peningkatan sarana dan prasarana kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan di kecamatan maupun di desa

8. Peningkatan pengawasan dan disiplin Aparatur Kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Peningkatan peran pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, sehat beretika dan berbudaya) agar mampu untuk menghadapi tantangan masa depan.
10. Penegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
11. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dikemukakan juga faktor-faktor kunci keberhasilan terhadap pencapaian program dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari Aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Susua untuk memberhasilkan program dan kegiatan di kecamatan.
2. Suasana Kecamatan Susua yang kondusif.
3. Kepemimpinan Kecamatan Susua harus ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, memiliki integritas yang kuat dan mampu menjadi motivator dan dinamisator dilingkungan Kecamatan.
4. Sumber daya aparatur Kecamatan Susua yang profesional, berkomitmen kuat terhadap tujuan kecamatan serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kabupaten, dan mampu menjalin kesinambungan program yang berbasis pada kebutuhan lokal.
6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing serta menghilangkan ego sektoral.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.

F. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

G. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Susua Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Kantor Camat Susua serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan pada kantor camat Susua adalah sebagai berikut :

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera			
Misi 1 : Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Susua	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 2. Mengembangkan pelayanan prima
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di	Peningkatan kualitas	Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem perencanaan

	kecamatan dalam pembangunan	perencanaan pembangunan	pembangunan partisipatif
	Meningkatnya kinerja pemerintah desa masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada masyarakat
Misi 5: Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat			
Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Kecamatan Susua	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Optimalisasi koordinasi dan validasi data warga kurang mampu	Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan warga kurang mampu
			Penguatan lembaga Masyarakat
		Menciptakan Kondisi masyarakat yang kondusif	Upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat
			Peningkatan wawasan kebangsaan dan toleransi kehidupan beragama
			Peningkatan kegiatan pelestarian budaya lokal

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Susua adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Indikator Kinerja Kecamatan Susua yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja

		periode RPJMD						pada akhir periode RPJM D
			Tahun 0	2024	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase tingkat kehadiran pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	0	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	10 0rg
5	Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan	4 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	30 Dok
6	Persentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan dari Kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	6 dok
8	Jumlah Kegiatan tentang kebhinnekaan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	6 Keg
9	Jumlah satuan keamanan lingkungan yg terbentuk di desa	0	4 Desa	4 Desa	4 Desa	3 Desa	3 Desa	18 Desa
10	Jumlah minimal kelompok binaan PKK	0	4 Desa	4 Desa	4 Desa	3 Desa	3 Desa	18 Desa

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah salah satu unsur perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan guna memberikan perspektif atau gambaran mengenai indikator yang ditargetkan dan capaian yang diperoleh. Adapun Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Susua
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%
		Nilai Lakip Kecamatan	73
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan dari Kecamatan	1 dok
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Desa	100%
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah satuan keamanan lingkungan yg terbentuk di desa	4 desa

B. Perencanaan Anggaran

Dalam mendukung ketercapaian terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan diatas, maka didukung oleh perencanaan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut :

Anggaran Perubahan (P-APBD) Kecamatan Susua Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp 321.419.550
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5.093.750
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 26.086.700
J U M L A H		Rp 352.600.000

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Susua, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2024 maupun Renja Tahun 2024.

A. Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasi, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari

organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem

informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survei sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2024 adalah

tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Susua Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Percentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Nilai Lakip Kecamatan	73	68,42	93,72%
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa	Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan dari Kecamatan	1 dok	1 dok	100%
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Percentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Desa	100%	100%	100%
		Jumlah satuan keamanan lingkungan yg terbentuk di desa	4 desa	4 desa	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah tercapai 100% lebih. Artinya capaian kinerja Kecamatan Susua pada tahun 2024 telah mencapai target yang sudah ditetapkan.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan	Percentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	100%	100%

Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Lakip Kecamatan	73	68,42	93,72%
--------------------------	-----------------------	----	-------	--------

a. Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran

Berdasarkan tabel diatas, persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran di Kantor Camat Susua telah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase ketercapaian 100%. Pencapaian target ini didukung dengan kinerja pegawai Kantor camat yang cukup baik sehingga penyelenggaraan administrasi perkantoran dapat terselenggara dengan baik sepanjang tahun 2024.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2024 ini masih sama dengan tahun 2022 yakni 100%, demikian pula dengan dibandingkan pada target renstra maka sudah tercapai juga sebesar 100%.



b. Nilai LAKIP Kecamatan

Target yang ditetapkan pada indikator Nilai Evaluasi Kinerja/LAKIP Kecamatan Susua pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah 73 (predikat B) dan terealisasi yakni 68,42 dengan predikat C. Nilai lakip Susua merupakan hasil evaluasi Inspektorat terhadap Lakip Kecamatan Susua Tahun 2023 berdasarkan Surat Inspektor Kabupaten Nias Selatan Nomor ; 700.1.2.1/200.8/ITDA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Lakip Kantor Camat Susua Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Penyampaian Lakip disertakan dengan dokumen renstra dan renja
2. Pada laporan kinerja dibuat indikator kinerja utama (IKU)
3. Dibuat perencanaan kinerja tahunan

4. Dibuat target kinerja eselon III dan eselon IV
5. Dibuat laporan kinerja.

Rekomendasi diatas telah ditindaklanjuti melalui laporan tindaklanjut LHE internal terhadap laporan kinerja tahun 2023.

Perbandingan Nilai Lakip Tahun 2023 dan Tahun 2024

Nilai Lakip 2022	Nilai Lakip 2023
92,29	68,42

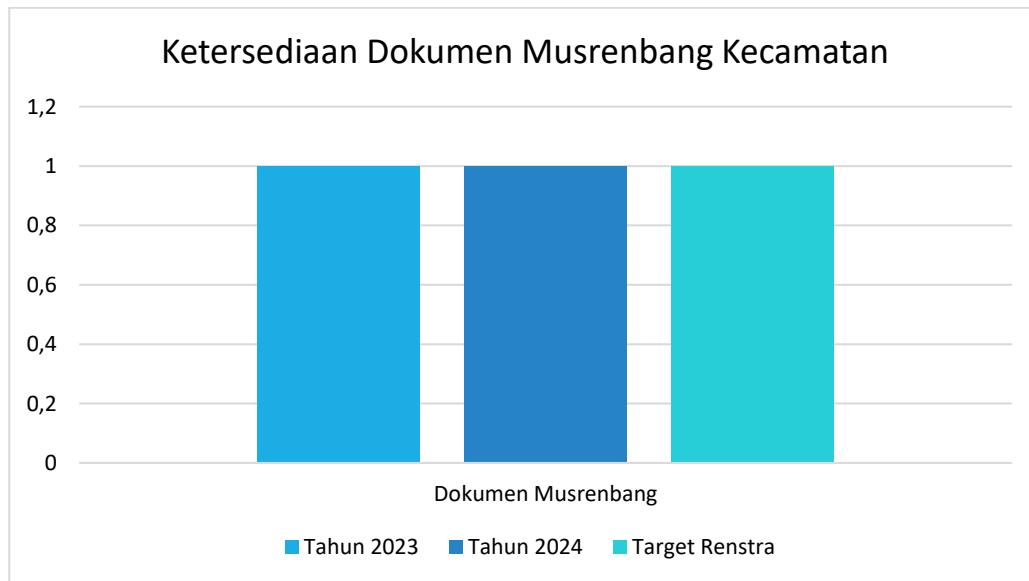
Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan nilai lakip tahun 2022 maka nilai lakip tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan nilai disebabkan karena perubahan komponen penilaian laporan kinerja berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.

2. **Sasaran strategis II** :Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan dari Kecamatan	1 dok	1 dok	100%

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yakni sebanyak 1 dokumen usulan musrenbang kecamatan yang tersedia, maka terealisasi juga sebanyak 1 dokumen dengan tingkat ketercapain 100%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Dokumen Musrenbang kecamatan disusun tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan pada tahun 2024. Dengan tercapainya kinerja ini, didukung oleh faktor-faktor berikut:

- Pelaksanaan musrenbang didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
- Kegiatan musrenbang dilaksanakan tepat waktu



Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama tersedia dokumen usulan musrenbang kecamatan sebagai salah satu bentuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan susua.

3. Sasaran strategis III : meningkatnya kinerja pemerintah desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Desa	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh desa ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2024. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar 100% juga, artinya bahwa telah mencapai target yang ditetapkan dimana seluruh desa di kecamatan susua telah difasilitasi dengan baik dalam hal penggunaan dana desa demi pembangunan desa dan kemajuan masyarakat di desa.

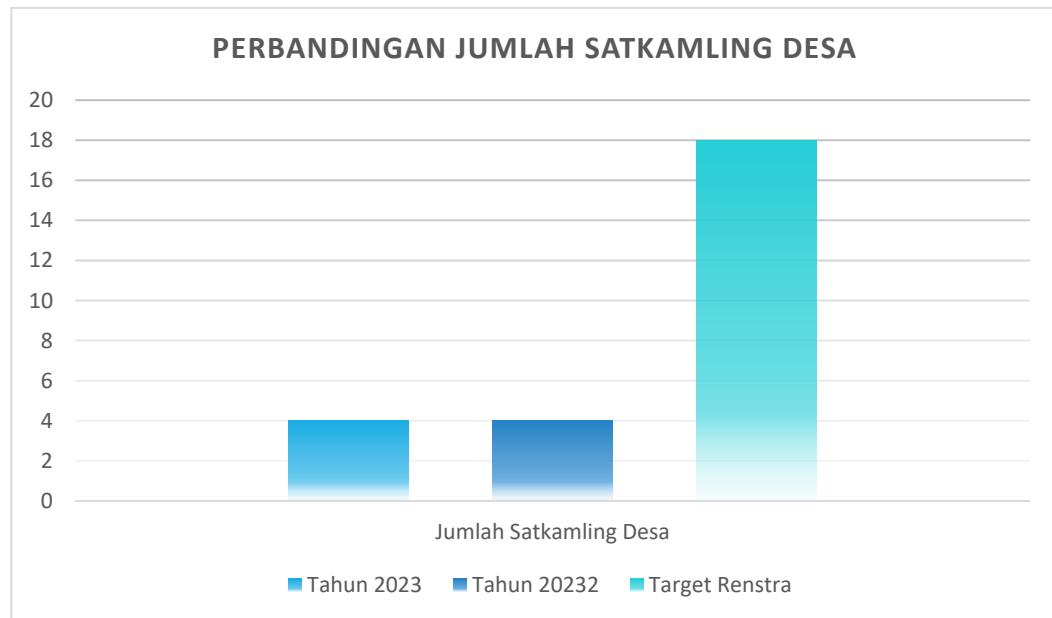


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2024, persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh desa secara berturut-turut tercapai sebesar 100%. Hal ini juga telah sesuai dengan target renstra kecamatan sebesar 100%. Dengan demikian, fasilitasi penggunaan desa berdampak terhadap jalannya pembangunan di tengah-tengah masyarakat yang ada di masing-masing desa di wilayah kecamatan susua.

4. Sasaran strategis IV : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah satuan keamanan lingkungan yg terbentuk di desa	4 desa	4 desa	100%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah satuan keamanan lingkungan yang terbentuk di desa dengan target 4 desa, maka telah terbentuk satkamling desa sebanyak 4 desa. Artinya pada tahun 2024, telah tercapai 100% target yang ditetapkan dengan membentuk satkamling tingkat desa di 4 desa yang ada di kecamatan susua. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman sehari-harinya.



Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa target jumlah satkamling pada tahun 2022 tercapai sebanyak 4 desa dan tahun 2024 juga tercapai 4 desa, dengan total pada akhir tahun renstra harus tercapai 18 desa memiliki satuan keamanan lingkungan. Artinya tiap tahun berbeda target yang ditetapkan namun pada akhirnya seluruh desa di kecamatan susua dengan total 18 desa wajib memiliki satkamling.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Susua dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (P-APBD) Tahun 2024 dengan jumlah **Rp 352.600.000** dan terealisasi dengan jumlah total **Rp 346.850**. Sisa anggaran sebesar **Rp5.749.694**. Artinya bahwa penyerapan anggaran kecamatan Susua mencapai hampir 100% atau sebesar 98,82%. Realisasi anggaran tahun 2024 telah mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024.

Adapun uraian realisasi anggaran Kecamatan Susua Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

RINCIAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN SUSUA TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp 321.419.550	Rp315.669.856

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5.093.750	Rp 5.093.750
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 26.086.700	Rp 26.086.700
J U M L A H			Rp 352.600.000
Rp346.850.306			

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Susua Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00
5	BELANJA DAERAH	352.600.000,00	348.450.306,00	98,82
5.1	BELANJA OPERASI	342.975.079,00	338.825.385,00	98,79
5.1.01	Belanja Pegawai	29.400.939,00	29.360.000,00	99,86
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.400.939,00	29.360.000,00	99,86
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	29.400.939,00	29.360.000,00	99,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.574.140,00	309.465.385,00	98,69
5.1.02.01	Belanja Barang	158.894.140,00	154.930.385,00	97,51
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	153.561.340,00	149.754.985,00	97,52
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.332.800,00	5.175.400,00	97,05
5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	118.680.000,00	118.535.000,00	99,88
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.680.000,00	118.535.000,00	99,88
	JUMLAH BELANJA OPERASI	342.975.079,00	338.825.385,00	98,79
5.2	BELANJA MODAL	9.624.921,00	9.624.921,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.624.921,00	9.624.921,00	100,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.624.921,00	9.624.921,00	100,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.883.112,00	4.883.112,00	100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.741.809,00	4.741.809,00	100,00

Laporan Kinerja Kecamatan Susua
Tahun 2024

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	9.624.921,00	9.624.921,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	352.600.000,00	348.450.306,00	98,82
	SURPLUS/DEFISIT	(350.100.000,00)	(346.850.306,00)	99,07

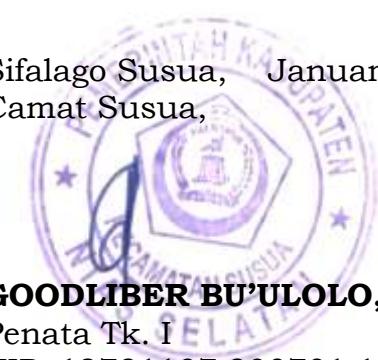
BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Susua Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan untuk mewujudkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Susua adalah wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang masih belum dicapai. LAKIP Kecamatan Susua Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Susua secara keseluruhan selama tahun anggaran 2024.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 99%. Namun demikian, pencapaian kinerja Kecamatan Susua ini disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di kecamatan Susua.

Sifalago Susua, Januari 2025
Camat Susua,



GOODLIBER BU'ULOLO, SST
Penata Tk. I
NIP. 19781107 200701 1 002